

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan LKjIP ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Bakesbangpol Kota Malang.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pembangunan bidang IPOLEKSOSBUD secara terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait serta masyarakat dalam rangka melaksanakan Pembangunan yang berkesinambungan, demokratis, partisipatif, harmonis, berkeadilan dan beradab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam menumbuhkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis dan transparan yang berbasis pada partisipasi aktif, kreatif, dan kemandirian masyarakat dengan dasar moral dan hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malang,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Malang

ZULKIFLI AMRIZAL, S.Sos M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720128 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	10
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2023	10
3. Perbandinga Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis	11
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	12
5. Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber daya.....	13
B. Realisasi Anggaran	15
BAB IV PENUTUP	17

Lampiran :

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan good governance yang merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perencanaan merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perencanaan merupakan pangkal upaya untuk mencapai kinerja visi misi daerah. Untuk mendapatkan perencanaan yang baik maka diperlukan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Sejalan dengan itu saat ini porsi perencanaan menjadi sangat dominan sehingga perlu disusun sebuah perencanaan yang berkualitas. Untuk mendukung hal itu pemerintah kota melalui RPJMD mengamanatkan :

1. Kelembagaan yang efektif
2. Kualitas perencanaan
3. Integrasi perencanaan dan penganggaran

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kota Malang memberikan tugas kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang menyelenggarakan fungsi :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

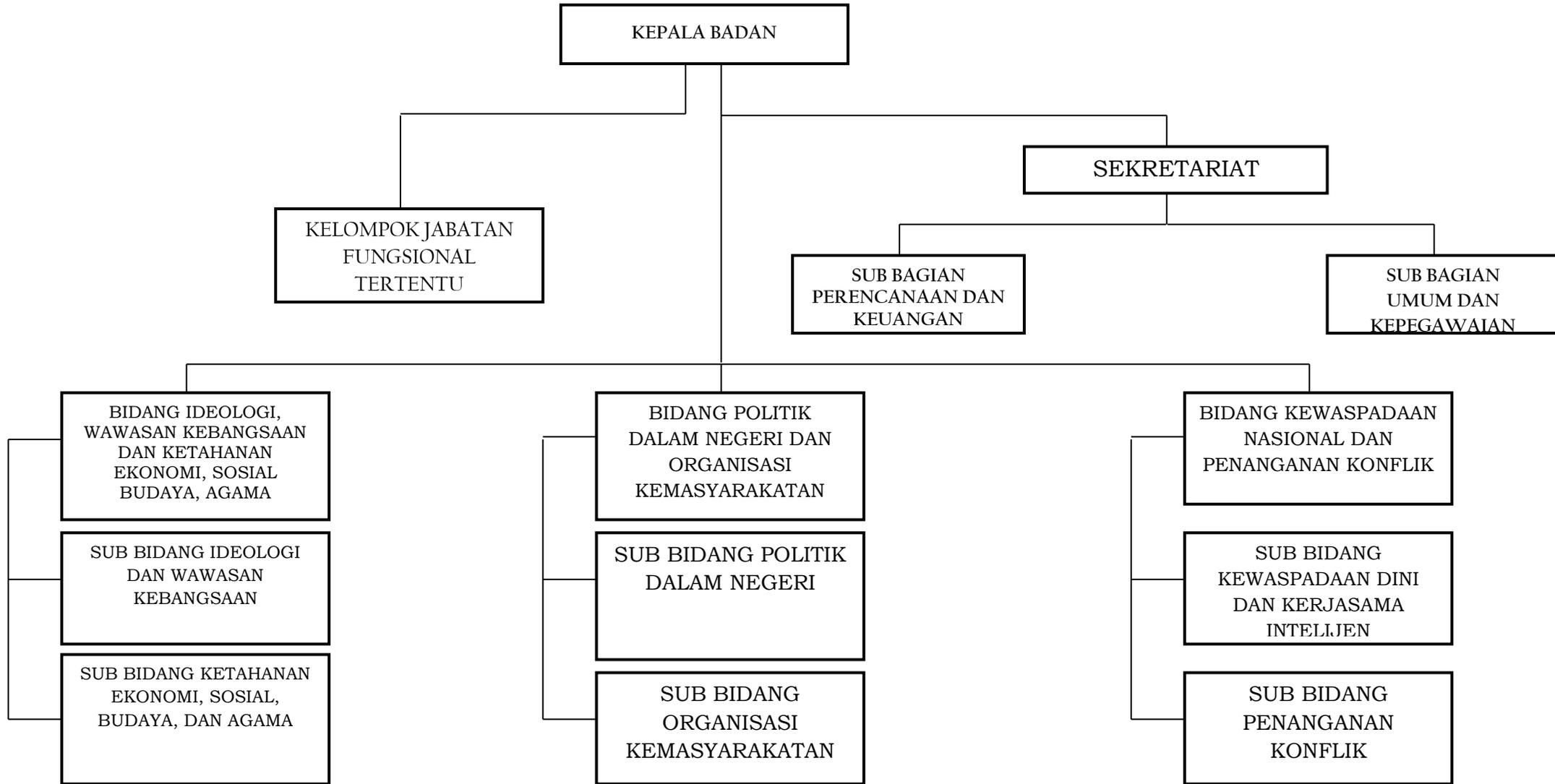
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas seorang atau pemimpin kolektif lembaga / instansi kepada walikota sebagai pemberi amanah / mandat. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik sekaligus sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang disampaikan secara periodik dan bermanfaat untuk:

- a. Mengetahui dan menilai Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya di bidang kepegawaian.
- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.

B. Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang terdiri 1 sekretariat, 3 bidang. Selanjutnya penjabaran organisasi dan tata kerja Badan Keatuan Bangsa dan Politik kota Malang ditetapkan dengan peraturan walikota No 80 tahun 2019 dengan bagan sebagai berikut :

C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang adalah meningkatkan Kondusivitas Lingkungan Sosial dengan mempunyai sasaran meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kondusivitas Lingkungan sosial	Persentase penyelesaian kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	1.Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa.	65%	67.5%	70%	72,5%	75%
			2.Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan.	37,5%	40%	42,5%	45%	47,5%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	72,5	80,5	82.05	83,5	84,9

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara mendayagunakan kekuatan berupa dukungan kekuatan internal.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah atau mengatasi ancaman.

3. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, mencegah dan mengatasi ancaman
4. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman
5. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigm
6. Melakukan sosialisasi program-program Bakesbangpol
7. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan penyelesaian konflik sosial
2. Nilai Survey kepuasan masyarakat
3. Jumlah penyelesaian kejadian gangguan ketertiban / konflik sosial
4. Partisipasi pemilih dalam Pilpres dan Pileg Tahun 2019
5. Penyelesaian kejadian gangguan Disintegrasi Bangsa
6. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Nomor:tentang.....

Adapun IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018 – 2023 Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	TARGET TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatkan Kondusivitas Lingkungan Sosial	Prosentase penyelesaian kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial	65%	67,5%	70%	72,5%	75%
1.	Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa. 2. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	65%	67.5%	70%	72,5%	75%
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	72,5	80,5	82.05	83,5	84,9

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2019 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2019 secara rinci adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kondisivitas Lingkungan sosial
Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa.	65%	1. Kewaspadaan Daerah 2. Pengembangan Wawasan kebangsaan	2.643.000.000 945.000.000
	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	37,5%	Pendidikan Politik Masyarakat Pemberdayaan Ormas dan LSM	1.147.058.100 175.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik		90%	Pelayanan administrasi perkantoran	1.022.806.000

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/sangat berhasil
90<x<110	Tercapai/berhasil
60<x<90	Cukup tercapai/cukup berhasil
X<60	Tidak tercapai/tidak berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	KET
Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa.	65%	57,14%	87,90 %	
	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	37,5%	84,69%	225,84%	
	Rata-rata Capaian			92,09%	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	72,5	75,8		

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	REALISASI KINERJA (%)					CAPAIAN KINERJA (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa.	65%	57,14					87,90				
	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	37,5%	84,69					225,84				

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023 (%)	2019 (%)	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
	Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	75%	57,14				
		Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	80%	225,85				
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	72,5	75,8				

4. Realisasi Kinerja dengan Mengacu pada strandard minimal (SPM) Standard Nasional lainnya

Tabel

Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2019	2019	2019
1	2	2	4	5	6

Karena indikator ini tidak mengacu pada SPM atau Standard nasional maka realisasi ini tidak di bandingkan dengan standard nasional.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2019 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis : Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Indikator 1 : Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa indicator ini dilaksanakan penggabungan 2 program yaitu program kewaspadaan daerah dengan 4 kegiatan dan program pengembangan wawasan kebangsaan dengan 6 kegiatan. Dari total kegiatan sebanyak 10 semua terlaksana dengan baik hanya saja pada kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam pembuatan naskah akademis RanPerda Narkoba belum bisa di laksanakan karena belum disetujui oleh DPRD mengingat jadwal pengajuan Ranperda dari pihak lain melebihi target sehingga di tolak. Tapi secara keseluruhan program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rata rata capaian sebesar 78,32%.
- b. Indikator 2 : Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan dilaksanakan dengan 2 program yaitu program Pemberdayaan Ormas dan LSM dan Pendidikan Politik Masyarakat. Yang mempunyai target rata rata 80% dan sudah mencapai realisasi capaian sebesar 84,89%. Ini sudah mencapai realisasi kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi harus diupayakan peningkatan kinerja di masing masing kegiatan terutama dalam kegiatan pengawasan Ormas dan LSM.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Dibandingkan dengan rata rata capaian kinerja 92,09%, maka realisasi anggaran sebesar 83,71% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel ...

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	65	57,14	87,90	3.588.000.000	2.817.165.658	78,51	89,31
	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan	80	84,69	105,86	1.322.058.100	1.194.804.752	90,37	117,14

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
		peran serta ormas dalam pembangunan			92,09%			
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	72,5	75,8	104,5	2.360.741.900	2.171.498.068	91,98%	113,61%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Persentase Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan yaitu ketentuan dengan capaian kinerja 105,86% dan capaian anggaran 90,37%, menunjukkan walaupun ada efisiensi anggaran 17,14% akan tetapi penggunaan dana belum efisien karena tidak mampu mencapai kinerja.
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel.

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa	78,32	Kewaspadaan Daerah	Proentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yg disebabkan konflik ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan	65	57,14	87,90	
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	84,69	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	60	96,39	160,65	Menambah volume sosialisasi
			Pemberdayaan ormas/LSM	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	100	50,95	50,95	Kegiatan pengawasan ormas lebih di tingkatkan
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	72,5	Pelayanan administrasi perkantoran					
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
			Aparatur					
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan keuangan					

- 1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Meningkatnya penyelesaian gangguan Disintegrasi Bangsa dan meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan

Indikator 1 : Proentase penyeleseian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yg disebabkan konflik ideologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan , dengan target 67,5 telah **berhasil** tercapai sebesar 78,32. atau tercapai 87,90%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Kewaspadaan Daerah dan program pengembangan wawasan kebangsaan

Indikator 2 :

Indikator 2 : Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan dengan target 80% telah **kurang berhasil** tercapai dengan baik. Hal ini **disebabkan**:

- Program Pemberdayaan Ormas dan LSM belum dapat dilaksanakan dengan baik terutama karena kegiatan Pengawasan Ormas dan LSM belum dapat mencapai output.

- 2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya....

Mengoptimalkan peranan Team terpadu untuk segera melaksanakan pengawasan baik di tingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan. Selain itu sering mengadakan sosialisasi baik formal maupun informal kepada Ormas dan LSM tentang peranan Ormas dan LSM dalam pembangunan Kota Malang serta menyosialisasikan tentang aturan baru dari Depdagri.

B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 85,05% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Realisasi Anggaran Bakesbangpol Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase
		Anggaran	Realisasi	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.022.806.000	966.946.718	94,54%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	85.500.000	76.590.000	89,58%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	83.956.000	70.685.689	84,19%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	199.050.000	196.660.000	98,80%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.500.000	18.589.500	75,88%
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	72.900.000	69.774.000	95,71%
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	511.900.000	507.794.379	99,20%
7	Peringatan/Kegiatan Insidentil	25.000.000	23.845.500	95,38%
8	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	20.000.000	3.007.650	15,04%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	871.297.550	804.553.780	92,34%
9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	86.680.000	86.580.000	99,88%
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	327.770.000	324.342.355	98,95%
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	168.940.000	161.784.925	95,76%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	47.100.000	32.620.000	69,26%
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	203.045.000	199.226.500	98,12%
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah	37.762.550	-	0,00%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.667.000	199.699.120	89,28%
15	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.667.000	199.699.120	89,28%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	242.971.350	200.298.450	82,44%
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.390.000	63.705.000	89,24%

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Prosentase
		Anggaran	Realisasi	
17	Penyusunan Laporan Keuangan	96.581.350	96.451.150	99,87%
18	Penyusunan Reviu/Renstra	75.000.000	40.142.300	53,52%
V	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	945.000.000	752.904.258	79,67%
19	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	360.000.000	320.126.500	88,92%
20	Sosialisasi Penanaman Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan	95.000.000	91.476.000	96,29%
21	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	240.000.000	236.741.258	98,64%
22	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	100.000.000	40.893.000	40,89%
23	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	100.000.000	26.119.700	26,12%
24	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	50.000.000	37.547.800	75,10%
VI	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.147.058.100	1.105.636.152	96,39%
25	Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	40.985.000	32.368.500	78,98%
26	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	454.402.100	439.450.600	96,71%
27	Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	651.671.000	633.817.052	97,26%
VII	Program Pemberdayaan Ormas dan LSM	175.000.000	89.168.600	50,95%
28	Peningkatan Kapasitas Ormas dan LSM	100.000.000	72.752.500	72,75%
29	Pengawasan Ormas dan LSM	75.000.000	16.416.100	21,89%
VIII	Program Kewaspadaan Daerah	2.643.000.000	2.064.261.400	78,10%
30	Fasilitasi FORKOPIMDA	230.000.000	159.825.700	69,49%
31	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	1.045.000.000	925.023.800	88,52%
32	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	718.000.000	419.600.400	58,44%
33	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	650.000.000	559.811.500	86,12%
JUMLAH		7.270.800.000	6.183.468.478	85,05%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang merupakan bagian dari Institusi Pemerintah Daerah menyusun LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.

Mengacu pada sasaran yang dijabarkan dalam 2 indikator sasaran kinerja dengan nilai rata-rata mencapai target, sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar 85,05% dan realisasi kinerja sebesar 92,09% maka dapat dikatakan tercapai/berhasil.

Hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang selama Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

- a. Kondisi keamanan di Kota Malang semakin kondusif, hal ini tidak lepas dari pengaruh gejolak nasional maupun regional yang cenderung menurun.
- b. Pembekalan materi deteksi dini dinilai perlu ditingkatkan pada tingkat lanjut. Materi ini amat penting bagi Kota Malang daerah yang dinamis dengan latar belakang penduduknya beraneka ragam.
- c. Pengkaderan tentang bela negara harus semakin digalakkan terutama dalam mengantisipasi tindakan radikalisme dan meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.

B. SARAN

- a. Peningkatan peran seluruh komponen bangsa dalam penciptaan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman.
- b. Melakukan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai wujud adanya perubahan paradigma.
- c. Melakukan sosialisasi program-program Bakesbangpol.
- d. Membuat jejaring informasi dengan seluruh komponen masyarakat guna mengantisipasi adanya potensi kerawanan.